



Kacamata Driyarkara adalah program kerja Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2020 berupa kajian yang berisi pemikiran-pemikiran atas isu-isu kontemporer baik di bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, maupun ekonomi dari perspektif BEM USD. Selamat membaca!

Kacamata Driyarkara:

Lindungi Komodo Kita!

Anggita Dwi Ardhani

Yoga A. Pongtuluran

Atthalla Syalsabhila

Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020

Tanah bagian timur di Indonesia terkenal dengan pesona alamnya yang sangat luar biasa, salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Pulau Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini oleh UNESCO ditetapkan sebagai salah satu warisan keajaiban dunia. Namun belakangan ini, kawasan tersebut telah menjadi perbincangan hangat mengenai penataan dan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Proyek penataan dan pembangunan sarana dan prasarana tersebut dinamakan 'Jurassic Park Taman Nasional Komodo'. 'Jurassic Park' di Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan di kalangan masyarakat dan media sosial. Konflik akan terjadi karena ada potensi berkurangnya wilayah kelola masyarakat akibat privatisasi. Berbagai kalangan menganggap proyek tersebut akan merusak habitat asli komodo, menyingkirkan penduduk setempat dan dilakukan hanya demi kepentingan investasi. Pulau Komodo dan Pulau Rinca sendiri sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi satwa komodo atau *Varanus Komodoensis*, hewan endemik purba yang hanya bisa ditemukan di NTT. Mengutip keterangan resmi Kementerian PUPR, Senin (26/10/2020), proyek di TN Komodo tersebut merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat. Pulau habitat komodo ini akan disulap besar-besaran oleh pemerintah dan investor swasta sebagai destinasi wisata premium. Pemerintah mengklaim, proyek-proyek yang dikerjakan di TN Komodo tersebut tetap memprioritaskan aspek ekologi berkelanjutan bagi spesies komodo dan sosial bagi penduduk sekitar. Adapun anggaran yang dianggarkan pemerintah pusat yakni dana sebesar Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra souvenir, kafe, dan toilet publik. Kementerian PUPR yang ditugaskan Presiden Jokowi juga akan membangun kantor pengelola kawasan, *selfie spot*, klinik, gudang, ruang terbuka publik, dan penginapan untuk peneliti.

Lalu pembangunan pemandu wisata (*ranger*), area trekking untuk pejalan kaki dan selter pengunjung didesain melayang atau *elevated* agar tidak mengganggu lalu lintas komodo. Secara keseluruhan untuk tahun 2020 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 902,47 miliar untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo yang meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan sumber daya air, permukiman, dan perumahan. Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo akan dilakukan secara bertahap, dengan pembenahan infrastruktur yang akan menjadi prioritas. Lima penataan Zona Waterfront dimaksud kini akan memasuki tahap lelang yang terdiri atas Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina (Inaya Bay), dan Zona E Kampung Ujung.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menilai, pembangunan proyek "Jurassic Park" di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan pemerintah ini tidak berbasis keilmuan. Menurutnya alih-alih melestarikan komodo dan habitat alamnya, pembangunan Jurassic Park justru akan membuat komodo tersiksa.¹ Selain berdampak buruk bagi kelangsungan habitat dan hidup komodo, pembangunan Jurassic Park juga memiliki dampak pada masyarakat sekitar. Proyek Jurassic Park Taman Nasional Komodo akan membuat masyarakat menjadi terasingkan ditanah kelahirannya sendiri.

Keterangan resmi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, tujuan dari pembangunan Jurassic Park taman komodo ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan.²

Kontroversi dari Proyek Pariwisata Super Premium

Mengutip dari KompasTv, proyek pembangunan senilai hampir Rp 69,98 miliar tersebut dinilai dapat merusak habitat asli komodo yang merupakan satwa endemik Indonesia yang dilindungi. Banyak kalangan yang melakukan penolakan atas proyek pembangunan "Jurassic Park" di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur sehingga memunculkan tagar *savekomodo* dan petisi yang meminta Presiden Jokowi untuk mencabut izin pembangunan oleh investor asing atau swasta di Taman Nasional Pulau Komodo. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, menilai bahwa penataan di Pulau Rinca otomatis dapat mengganggu ekosistem komodo. Ruang hidup komodo menjadi berkurang akibat adanya infrastruktur permanen dalam skala besar. Umu Wulang, selaku Direktur Walhi NTT, mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan terlebih dahulu urusan sains dan konservasi ekosistem komodo.

Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan Taman Nasional Komodo menjadi destinasi sendiri yang bermula dari dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan

¹ Muhammad Idris, "Mengenal Proyek "Jurassic Park" di TN Komodo yang Jadi Polemik", diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/26/082650426/mengenal-proyek-jurassic-park-di-tn-komodo-yang-jadi-polemik?page=all> , pada tanggal 11 November 2020 pukul 10.00 WIB

² Sania Mashabi, "Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo" Tak Berbasis Keilmuan", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/17372111/walhi-kecam-pembangunan-jurassic-park-komodo-tak-berbasis-keilmuan> , pada tanggal 11 November 2020 pukul 12.00 WIB

Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang izin pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Permen yang dikeluarkan pada 2010 itu merupakan payung bagi perusahaan-perusahaan swasta berinvestasi di lebih 54 taman nasional di Indonesia.³

Kritik publik terhadap pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, masuk akal. Pulau tersebut telah lama ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan tujuan melindungi satwa langka, Komodo dan ekosistem pendukung yang ada di wilayah tersebut. Untuk diketahui, kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980. Badan PBB dalam hal ini adalah UNESCO mengakui Komodo sebagai warisan dunia pada tahun 1991.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, secara jelas mengatur upaya perlindungan satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Aturan ini memuat secara lebih rinci upaya melindungi flora dan fauna yang ada di wilayah konservasi seperti, Taman Nasional Komodo.

Sebagai wilayah konservasi, secara detail ada tuntutan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga hewan dan tumbuhan serta ekosistem pendukung yang ada dalam kawasan konservasi. Adanya pembangunan resort mewah di Pulau Rinca, secara jelas mengancam TNK sebagai kawasan yang dilindungi beserta hewan Komodo. Beberapa hal mendasar yang ditegaskan dalam Undang-Undang ini yakni pelaksanaan kegiatan kepariwisataan mesti mengacu pada prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal serta memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

³ CNN Indonesia, “Mengenal Proyek Jurassic Park di NTT”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201026142334-92-562801/mengenal-proyek-jurassic-park-di-ntt> , pada tanggal 12 November 2020 pukul 16.00 WIB

Pemerintah juga perlu mengingatkan melalui ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Dalam UU ini secara tegas mengatur prinsi-prinsip tentang pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia.⁴

Pengembangan KSPN Labuan Bajo, termasuk Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, akan berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dampak terhadap lingkungan, Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi berpendapat bahwa terdapat beberapa potensi gangguan yang timbul ketika pembangunan KSPN dilaksanakan.

Pertama, potensi perubahan bentang alam akibat pembangunan infrastruktur yang berdampak pada gangguan terhadap biodiversitas alam. Kemudian terjadi gangguan air tanah hingga potensi residu dari KSPN seperti sampah dan limbah.

Kedua, berpotensi mengganggu kehidupan biota laut karena pencemaran. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan daya dukung dan daya tampung KSPN ini karena krisis air juga terjadi di kawasan ini.

Ketiga, TNK dan sekitarnya merupakan kawasan Taman Nasional, maka seharusnya pemerintah benar-benar mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur. Sementara dampak terhadap masyarakat, akan terjadi konflik sumber daya lahan dan perebutan sumber daya air yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Konflik akan terjadi karena ada potensi berkurangnya wilayah kelola masyarakat akibat privatisasi.⁵

Dasar Penolakan Masyarakat atas Proyek Jurassic Park di TN Komodo

Beredarnya foto seekor komodo yang menghadang truk proyek pembangunan *jurassic park* di pulau rinca menuai berbagai kritikan dari masyarakat Indonesia, khususnya pengguna media sosial. Akibat dari kemunculan foto tersebut, publik secara beramai-ramai membuat tagar

⁴ Marsi Edon, “Pembangunan Jurassic Park Pulau Rinca Ancaman Nyata Untuk Satwa Langkah Komodo”, diakses dari <https://indonews.id/artikel/313513/Pembangunan-Jurassic-Park-Pulau-Rinca-Ancaman-Nyata-untuk-Satwa-Langkah-Komodo/>, pada tanggal 12 November 2020 pukul 19.00 WIB

⁵ Hilda B Alexander, “Pulau Rinca Jadi “Jurassic Park” Berdampak Serius Terhadap Lingkungan”, diakses dari <https://properti.kompas.com/read/2020/09/17/070000721/pulau-rinca-jadi-jurassic-park-berdampak-serius-terhadap-lingkungan?page=all>, pada tanggal 12 November 2020 pukul 21.00 WIB

SaveKomodo yang sempat menjadi Trending Topik di media sosial Twitter. Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Taman Nasional Komodo tersebut dapat mengganggu keberlangsungan hidup komodo dikarenakan suara bising yang ditimbulkan oleh proses pembangunan di kawasan yang dihuni oleh komodo itu, dan oleh karena itu, publik beramai-ramai mengecam aksi pembangunan yang menggelontorkan dana hampir 70 miliar itu, dan menuntut agar pemerintah menghentikan proyek yang berpotensi merusak tersebut.⁶

Aksi penolakan secara khusus disuarakan oleh masyarakat wilayah sekitar yang terdampak akibat dari proyek pembangunan sarpras di Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau Komodo. Penolakan tersebut dilandaskan pada asas kebermanfaatannya yang dinilai oleh masyarakat sekitar terlalu menguntungkan pihak investor dan mengesampingkan faktor kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sekitar menilai bahwa pembangunan secara besar-besaran yang didanai oleh para investor tidak membawa manfaat apa-apa kepada masyarakat sekitar, dan justru malah terkesan seperti privatisasi lahan atas pulau-pulau dalam Taman Nasional yang seharusnya dimiliki bersama dan dikelola atas dasar pemberdayaan berbasis komunitas.

Warga Ata Modo, yang merupakan warga asli pulau Rinca sejak dahulu kala, juga menjadi korban atas pembangunan proyek ini yang mengakibatkan warga sekitar kehilangan 151,9 hektar lahan perkebunan mereka karena akan dijadikan salah satu lokasi pembangunan sarpras yang ada.⁷ Selain kehilangan lahan akibat pembangunan sarpras yang besar-besaran dan boros lahan, dengan dalil bahwa hal ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan, efek negatif lain yang dapat terjadi kepada masyarakat sekitar ialah masyarakat yang memiliki usaha seperti penginapan, usaha *tour guide*, usaha penyewaan kapal, dan lain-lain akan terancam tersingkirkan akibat dari kehadiran perusahaan swasta yang mendapatkan izin dari KLHK untuk membangun bisnis jasa wisata di pulau-pulau tersebut.⁸

⁶ Gunadha Reza. 2020. "Viral Foto Komodo Hadang Truk Proyek". Diakses dari : <https://www.suara.com/news/2020/10/26/125801/viral-foto-komodo-hadang-truk-proyek-jurassic-park-save-komodo?page=2> pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

⁷ Dekannews.com. 2020. "Jokowi Diminta Hentikan Proyek Jurassic Park di Pulau Komodo". Diakses dari : <https://dekannews.com/baca/jokowi-diminta-hentikan-proyek-jurassic-park-di-pulau-komodo> pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

⁸ sunspiritforjusticeandpeace.org. 2020. "Lima Latar Penolakan Warga Atas Realisasi Pembangunan Proyek Swasta Dalam Kawasan TNK". Diakses dari : <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2018/08/03/lima-latar-penolakan-warga-atas-realisisi-pembangunan-proyek-swasta-dalam-kawasan-taman-nasional-komodo/814/> pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

Kecaman juga datang dari Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang yang secara keras menentang proyek kapitalisasi di TNK. Beliau menentang legitimasi pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan, dan kesejahteraan terhadap proyek mega yang dijalankan di pulau-pulau komodo. Alasan pemerintah yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut ditujukan untuk keamanan wisatawan yang berkunjung ke pulau-pulau ini dibantah keras oleh Umbu Wulang yang mengatakan bahwa selama ini keamanan daripada wisatawan sudah terjamin mengingat standar pengamanannya pun sudah baik, oleh karena itu pembangunan berskala besar di Pulau Rinca, Padar, dan Komodo hanyalah merupakan kepentingan bisnis semata, dan mengesampingkan faktor sosial dan lingkungan.

Selain itu, Beliau juga mengkritik transparansi dari proses pra-pembangunan yang tidak melibatkan Walhi sebagai tim penilai Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), yang ditandai dengan tidak adanya draf amdal yang diterima oleh pihak Walhi, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian atas dampak-dampak dari pembangunan proyek *jurassic park* ini. Ia juga mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk mengeluarkan dua pulau dari Taman Nasional Komodo dan dijadikan kawasan ekonomi khusus menambah kekhawatirannya terhadap dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pembangunan yang berlebihan ini. Seharusnya pemerintah bukan hanya mengutamakan kepentingan bisnis dan investor, melainkan juga memperhatikan faktor lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam merencanakan pembangunan sarpras di TNK.⁹

Secara kontras, Dirut Konservasi Keanekaragamanhayati KLHK, Indra Exploitasia, menyanggah tudingan yang disampaikan oleh Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang yang mengatakan bahwa proyek mega ini hanya memperhatikan kepentingan keparawisataan tanpa mempedulikan unsur konservasi. Indra Exploitasia sendiri mengatakan bahwa strategi KLHK dalam ini memiliki empat tujuan utama, yaitu : terpeliharanya habitat, peningkatan populasi komodo, daya dukung sarpras yang memadai, dan keseimbangan wisata dengan konservasi. Selain itu, ia mengatakan bahwa berbagai kajian-kajian telah dilakukan berdasarkan *scientific* dan *evidence* untuk mengetahui dampak-dampak dari proyek ini, dan juga telah dilakukan konsultasi

⁹ KOMPASTV. 2020. "Proyek Jurassic Park Pulau Rinca Tuai Polemik, Apa yang sebenarnya Terjadi?". Diakses dari : https://www.youtube.com/watch?v=It3Jn1nKhh0&t=66s&ab_channel=KOMPASTV pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

publik dengan dinas provinsi, *stakeholder*, serta berbagai Mitra KLHK yang juga ikut melakukan *sidemonitoring*.¹⁰

Masa Depan Ekologi Taman Nasional Komodo

Komodo merupakan salah satu hewan purba yang sampai saat ini masih hidup endemik di berbagai pulau di NTT. Komodo yang mempunyai nama latin “*Varanus Komodoensis*” ini mempunyai beberapa keunikan yang membuatnya berbeda dengan reptil-reptil lain, salah satunya adalah kemampuannya bereproduksi secara aseksual melalui partenogenesis. Dalam kondisi tidak ditemukannya pejantan, komodo betina mampu melakukan pembuahan terhadap dirinya sendiri dan menghasilkan telur, yang artinya ini memudahkan perkembangbiakan komodo. Namun komodo juga mempunyai sifat kanibal, dalam kondisi kekurangan makanan, komodo dapat memangsa spesiesnya sendiri demi kelangsungan hidupnya, hal ini tentunya yang menjadi perhatian bagi pengelola TNK dan pemerintah, agar memastikan jumlah pakan komodo tercukupi.¹¹

Sampai saat ini, populasi komodo yang ada di Taman Nasional Komodo relatif stabil di kisaran 2000-3000an yang tersebar di berbagai pulau, seperti Pulau Komodo sebanyak 1727 ekor, Pulau Gili Motang 58 ekor, Pulau Nusa Kode 57 ekor, Pulau Padar 6 ekor, dan di Pulau Rinca sebanyak 1049 ekor. Pada tahun 2018, jumlah populasi komodo tercatat naik dari sebelumnya di 2016 sebanyak 1186 ekor, dan di tahun 2017 sebanyak 1412 ekor, perhitungan jumlah populasi komodo tersebut dilakukan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) bekerja sama dengan Komodo Survival Project yang didukung dari luar negeri. Untuk menjaga keberlangsungan populasi komodo di TNK, Balai Taman Nasional Komodo terus menjaga keasrian lingkungan tinggal komodo, serta melakukan patroli secara rutin guna mencegah aktivitas perburuan hewan liar yang dapat mengancam sumber makanan komodo tersebut.¹² Hal senada yang positif pun juga

¹⁰ KOMPASTV. 2020. “Ingin tahu jelas Tentang Proyek Di Pulau Komodo yang Bikin Riuh Netizen?”. Diakses dari : https://www.youtube.com/watch?v=1reMgCs2x5Y&ab_channel=KOMPASTV pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

¹¹ Ade M. 2016. “Inilah 10 Fakta Tentang Komodo yang Tak Banyak diketahui”. Diakses dari : <https://tentik.com/inilah-10-fakta-tentang-komodo-yang-tak-banyak-diketahui/> pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

¹² Prima Erwin. 2019. “Jumlah Populasi Komodo 2018 Meningkat”. Diakses dari : <https://tekno.tempo.co/read/1171476/jumlah-populasi-komodo-2018-meningkat/full&view=ok> pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

disampaikan Wiratno selaku Jendral Konservasi SDA dan Ekosistem KLHK, yang mengatakan bahwa jumlah populasi komodo di TNK relatif stabil dan bahkan mengalami penambahan selama tiga tahun terakhir, yang pada tahun 2018 populasi sebanyak 2897 ekor, dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3022 ekor.¹³

Bertolak belakang dengan perkembangan positif mengenai populasi komodo yang bertambah selama tiga tahun terakhir, sebuah penelitian dari para ahli yg berasal dari Australia memprediksi kepunahan massal komodo kemungkinan besar akan terjadi di tahun 2050 akibat dari perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim tersebut mula-mula akan menggeser suhu normal yang ada di habitat asli komodo, dan akan berakibat pada pengurangan mangsa komodo serta kerusakan lingkungan yang secara perlahan akan mengurangi jumlah populasi komodo. Penelitian yang dipimpin oleh Alice Jones dari Universitas Adelaide ini mengukur parameter tersebut dengan menggunakan beberapa data pemantauan komodo yang ekstensif, dan proyeksi perubahan permukaan laut. Oleh karena itu, Jones dan kawan-kawan menyarankan kepada lembaga konservasi nasional dan provinsi harus bertindak sesegera mungkin dalam menanggulangi masalah ini. Para peneliti menyoroti dua pulau besar yaitu Pulau Rinca dan Pulau Komodo perlu menjadi prioritas konservasi, karena dua tempat tersebut merupakan tempat yang paling aman dari serangan pemanasan global.¹⁴

Berkaca dari prediksi tersebut, pemerintah seharusnya lebih memfokuskan konservasi TNK, dibandingkan dengan membangun mega sarpras dan ekonomi. Direktur Walhi, NTT, Umbu wulang menegaskan bahwa pembangunan berskala besar dapat membahayakan habitat komodo karena suara-suara yang ditimbulkan dari proses pembangunan dan pengerjaan yang dilakukan dekat dengan habitat komodo tersebut. Hal senada pun diakui oleh Kabid Humas dan Protokol setda NTT, yang mengatakan pengerjaan proyek di Loh Buaya memang akan mengganggu komodo yang ada di sekitar proyek pengerjaan tersebut, namun ia menyambung bahwa hanya terdapat enam ekor komodo yang berlalu lalang di sekitar proyek Loh Buaya tersebut, dan sisanya

¹³ Fikri DA. 2020. “Meningkat dalam 3 Tahun Terakhir, Populasi Komodo Kini 3022 Ekor”. Diakses dari : <https://travel.okezone.com/read/2020/10/30/406/2301423/meningkat-dalam-3-tahun-terakhir-populasi-komodo-kini-3-022-ekor> pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

¹⁴ Tim Wowkeren. 2020. “Waduh! Komodo diprediksi Punah 30 Tahun Lagi, Ini penyebab Utamanya”. Diakses dari : <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00336644.html> pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

yaitu 1300an berada di luar lingkungan proyek, sehingga secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di pulau rinca tidak akan mengganggu ekosistem komodo¹⁵.

Saat ini, foto seekor komodo yang tengah “menghadang” sebuah truk proyek yang akan melintas di Pulau Rinca Taman Nasional “TN” Komodo, tengah viral di tengah masyarakat. Hal ini terlalu “gila” dan mengundang reaksi marah masyarakat yang mengundang berbagai polemik, di tengah santernya wacana pemerintah untuk membangun geopark yang digadag-gadang akan mirip Jurassic Park.

Seperti yang telah beredar luas di berbagai media, banyak pihak, baik oleh para warga lokal dan segala suara baik itu dari komunitas ataupun perseorangan menolak untuk menghentikan pembangunan yang dinilai akan merusak ekosistem dan kelangsungan hidup meskipun menurut siaran pers dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), jumlah total biawak komodo yang pada 2018 sebanyak 2.897 individu bertambah 125 menjadi 3.022 individu pada 2019.¹⁶

Bukan tanpa alasan sebagian besar masyarakat baik lokal maupun non-lokal menolak pembangunan Geopark di Taman Konservasi Komodo di Pulau Rinca tersebut, ada 5 hal penting yang akan dirangkum untuk menggambarkan kembali atas penolakan pembangunan tersebut.

1. Penguasaan (pengelolaan) pihak swasta atas titik-titik strategis dalam kawasan Taman Nasional Komodo tidak membawa manfaat apa-apa terhadap masyarakat dalam kawasan dan untuk Manggarai Barat secara umum. Masalah yang muncul justru terjadi pencaplokkan sumber daya publik dan privatisasi atas lahan (pulau) dalam kawasan TNK.

¹⁵ KOMPASTV. 2020. “proyek Jurassic park Tak Akan Ganggu Komodo, Ini Penjelasan Pemprov NTT”. Diakses dari : https://www.youtube.com/watch?v=G6LOmiw6gn8&ab_channel=KOMPASTV pada 12 november 2020, pukul 18.00 WIB

¹⁶ Septian Denny, “Foto Mengadang Truk Viral, Ternyata Segini Populasi Komodo di Indonesia”, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4394073/foto-mengadang-truk-viral-ternyata-segini-populasi-komodo-di-indonesia#:~:text=Menurut%20siaran%20pers%20dari%20KLHK,menjadi%203.022%20individu%20pada%202019> , pada tanggal 09 November 2020 pukul 21.00 WIB

2. Kehadiran pihak swasta dalam pengelolaan kawasan strategis Taman Nasional Komodo akan menambah beban penderitaan bagi masyarakat dalam kawasan dan juga para pelaku usaha wisata lokal.

3. Realisasi proyek fisik seperti villa, *homestay* dan tempat publik fisik lainnya dalam kawasan Taman Nasional Komodo akan membawa dampak buruk pada keberlanjutan kealamiah kawasan Taman Nasional Komodo. Ruang hidup dan penghidupan (habitat) satwa komodo dan hewan lainnya akan terganggu. Siklus dan rantai ekosistem alamiah akan rusak. Suasana alam yang liar akan menjadi bising dan tidak terelakkan akan menyebabkan polusi (tanah dan udara).

4. Dalam tataran kebijakan dan regulasi, terkesan, Pemerintah Pusat melalui Balai Taman Nasional Komodo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak berpihak pada masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dalam melalui instrumen hukum yang dibuat, pemerintah meloloskan dan membiarkan pihak swasta untuk bukan hanya mengelola kawasan strategis tetapi juga merebut ruang kepemilikan, akses, dan manfaat pembangunan pariwisata. Sementara di sisi lain, ruang hidup dan penghidupan warga dibatasi dan dimarginalisir. Dalam jeratan kebijakan konservasi, warga dalam kawasan Taman Nasional komodo bukan hanya dilarang untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada (mendirikan sekolah, melaut dan membuka akses jalan), tetapi bahkan secara sistematis menyingkirkan warga dalam kawasan itu sendiri.

5. Alasan penolakan lain, yang paling teknis dan sederhana adalah menghindari masuknya pihak swasta (investor) untuk mengelola kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Sebab, jika mengizinkan dua perusahaan swasta ini mengelola kawasan strategis dalam kawasan Taman Nasional Komodo bukan tidak mungkin pihak swasta lain akan berbondong-bondong merebut akses dan manfaat pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat setempat. Oleh karenanya para pihak menentang keras rencana realisasi proyek usaha jasa dan sarana wisata alam yang

dilakukan oleh PT. Segara Komodo Lestari di Loh Buaya Pulau Rinca dan PT. Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar dan Loh Liang Pulau Komodo.¹⁷

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo tetap memperhatikan habitat Komodo Baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, maupun perbaikan hunian penduduk. “Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” ucap Basuki dalam keterangan tertulis.¹⁸

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan penataan dalam proyek Jurassic Park di Pulau Rinca ini hanya meliputi

- (1) Dermaga Loh Buaya, merupakan peningkatan dermaga eksisting;
- (2) Bangunan pengaman pantai berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk dan keluar ke kawasan tersebut;
- (3) Elevated Deck pada ruas eksisting, berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide dan peneliti, dirancang setinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas serta melindungi keselamatan pengunjung;
- (4) Bangunan Pusat Informasi yang terintegrasi dengan elevated deck, kantor resort, *guest house* dan kafetaria.

¹⁷ KBS, “Lima Latar Penolakan Warga Atas Realisasi Pembangunan Proyek Swasta Dalam Kawasan Taman Nasional Komodo”, diakses dari <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2018/08/03/lima-latar-penolakan-warga-atas-realisasi-pembangunan-proyek-swasta-dalam-kawasan-taman-nasional-komodo/814/> , pada tanggal 10 November 2020 pukul 20.43

¹⁸ Vincent Fabian Thomas, “Menteri PUPR Klaim Proyek di Pulau Rinca Tak Ganggu Habitat Komodo”, dikutip dari <https://tirto.id/menteri-pupr-klaim-proyek-di-pulau-rinca-tak-ganggu-habitat-komodo-f6mi> pada tanggal 13 November 2020

(5) Bangunan penginapan untuk para ranger, pemandu wisata, dan peneliti, yang dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan habitat komodo.¹⁹

SIKAP BEM USD

Maka dari itu, berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma melalui Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis 2020 menyatakan sikap untuk:

1. Mendorong pemerintah untuk memfokuskan konservasi Taman Nasional Komodo, dibandingkan dengan membangun mega sarpras dan proyek pariwisata premium
2. Mengingat bahwa suasana alam yang liar akan menjadi bising dan tidak terelakkan akan menyebabkan polusi yang dapat mengganggu ekosistem sekitar saat pembangunan mega proyek ini, maka pemerintah diharapkan untuk meninjau kembali rencana pembangunan tersebut
3. Mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal isu-isu ekologi secara bersama-sama, khususnya atas pembangunan mega proyek di Taman Nasional Komodo

¹⁹ Ibid.